PUTUSAN MK TERHADAP KEMENANGAN BUPATI SABU RAIJUA YANG TERBUKTI SEBAGAI
WARGA NEGARA ASING.

ALIF UTAMA KADIR (10200120218)

Abstrak

Hal itu diputuskan dalam pembacaan sidang putusan perkara 135/ PHP.BUP-XIX/2021 yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut tiga Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba dalam pilkada Sabu Raijua.

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, Mahkamah Konstitusi mengatakan status Orient sejak 2007 adalah warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan paspor Amerika Serikat. Jika mengacu pada undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Sehingga saat Orient mempunyai paspor Amerika Serikat, saat itu secara otomatis status Warga Negara Indonesia (WNI) tidak berlaku.

Selain itu mengacu pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 terkait persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati mengharuskan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Sehingga pencalonan Orient tidak dapat diterima. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Kata kunci : Terbukti.

A. Latar Belakang

Mahkamah konstitusi memutuskan mendiskualifikasi bupati Sabu Raijua terpilih ORIENT RIWU KORE dari hasil pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak, Orient masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Hal itu diputuskan dalam pembacaan sidang putusan perkara 135/ PHP.BUP-XIX/2021 yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut tiga Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja

Haba dalam pilkada Sabu Raijua.

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, Mahkamah Konstitusi mengatakan status Orient sejak 2007 adalah warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan paspor Amerika Serikat.

Jika mengacu pada undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Sehingga saat Orient mempunyai paspor Amerika Serikat, saat itu secara otomatis status Warga

Negara Indonesia (WNI) tidak berlaku.

Selain itu mengacu pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 terkait persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati mengharuskan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Sehingga pencalonan Orient tidak dapat diterima.¹ Mahkamah Konstitusi menganggap Orient tidak jujur terhadap status kewarganegaraannya selama ini.

Dengan gugurnya Orient, Mahkamah Konstitusi mengatakan pendampingnya, Thobias Uly juga ikut gugur. pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi mengatakan gugurnya Orient tidak otomatis pasangan bupati dan wakil bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak kedua menang. Mahkamah Konstitusi menjelaskan KPU harus menggelar pilkada ulang

¹ Anwar usman (*ketua Mahkamah Konstitusi*) 15/4/2021

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 11.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PAN.MK/AP3/02/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 134/PHP.BUPXIX/2021 pada tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) adalah:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan

2. LEGAL STANDING PEMOHON

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi 6 2020) yang menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” maka yang memiliki legal standing ialah pasangan calon bupati NAMUN legal standing inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020.
- d. Bahwa sekalipun demikian, Para pemohon sebagai warga negara dan aliansi dari warga negara (AMAPEDO), memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur dan adil, melalui pemilu yang bermartabat.
- e. Bahwa Permohonan para Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional para Pemohon sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).
- f. Bahwa Permohonan para Pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim

Ketua (Chief Justice) John Marshal dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) di mana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, "The Rhetorical Uses of *Marbury v. Madison*: The Emergence of a "Great Case", *Wake Forrest Law Review*, Vol. 38, p. 375).

- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan para Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan Oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 6 Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasion Nomor Urut 2, sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU(D) Sabu Raijua terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

2. Bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstiusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah Keputusan KPU Sabu Raijua dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral.

3. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua Keputusan Termohon yakni:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 , beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua melalui keputusan Termohon yakni:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK .03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2021
- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

4. Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi martabat konstitusi, hukum dan moral.

5. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional para Pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kepentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, para Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konsitusi, keadilan dan kebenaran materil (*substantive*) sepatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):

a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan

b. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan

c. Pemilihan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (lihat Bukti P-1)

d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 (lihat Bukti P-2).

2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan adalah memegang warga negara Amerika Serikat.

3. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Pasion) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore telah mengakui bahwa dia memiliki Passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat.

4. Bahwa oleh karena Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat maka dengan sendirinya Status WNI-nya otomatis hilang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Huruf a

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri";

5. Bahwa Rumusan Pasal 23 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di atas sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa Indonesia tidak menganut asas dual citizenship (kewarganegaraan ganda) sehingga sekali lagi bagi WNI yang telah menerima kewarganegaraan Amerika dengan sendirinya tidak lagi menyandang status WNI-nya atau gugur secara otomatis status WNI-nya.

6. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi (Baca UUD 1945) yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dan dilakukan oleh Termohon karena Warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan WNI dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

7. Bahwa fakta status warga negara Amerika yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan oleh Termohon sebagai sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga menciderai Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan ayat (3) "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

8. Bahwa dalam konteks ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Penyelenggara Pemilihan yakni KPUD Sabu Raijua telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang WNI lainnya, untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan telah memperlakukan WNI lainnya secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.

9. Bahwa fakta status warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar hak dasar WNI untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

10. Bahwa keputusan-keputusan Termohon yang harusnya dinyatakan batal demi hukum adalah:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
- c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 , tanggal 16 Desember 2020;

d. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan para Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

ATAU

3. Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

Dalam Pokok Perkara

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK .03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020

6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

7. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Menetapkan peraih suara terbanyak kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan

DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSI DAN HERMAN HEGI RADJA HABA.

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 12 Maret 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh HERMAN LAWE HIKU, MARTHEN RADJA selaku perorangan Warga Negara Indonesia dan YANUARSE BAWA LOMI untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) dengan alasan:

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

1.2. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif.	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

2.1. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa: "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan";

2.2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan: "Pemohon dalam perkara hasil perselisihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon";

2.3. Bahwa Pemohon dalam bagian uraian dalil kedudukan hukum (legal standing) huruf c mendalilkan sebagai berikut "Bahwa dengan demikian sejauh objek yang disengketakan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih maka yang memiliki legal standing adalah pasangan calon Bupati namun legal standing inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020";

2.4. Bahwa dengan adanya ketentuan mengenai legal standing, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon, namun Pemohon menciptakan aturan baru dengan membuat pemaknaan sendiri/tafsiran sendiri tentang legal standing Pemohon dalam permohonan Pemohon, padahal ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan sangat terang dan jelas telah menentukan bahwa "Pemohon dalam perkara hasil perselisihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon";

2.5. Bahwa Pemohon HERMAN LAWE HIKU, tempat dan tanggal lahir: Mania 06 Maret 1963, agama: Kristen, alamat: Mania, RT.18 RW.009, Desa Mania, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan: Wiraswasta, NIK: 5320010603630003 dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia dan bukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;

2.6. Bahwa Pemohon MARTHEN RADJA, tempat dan tanggal lahir: Labohede 12 Desember 1961, agama: Kristen, alamat: RT.005/RW.004, Desa Labohede, Kecamatan Hawumehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan: Petani, NIK: 5320011212610002 dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia bukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;

2.7. Bahwa Pemohon YANUARSE BAWA LOMI, Jabatan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) Alamat: RT.012/RW.004, Dusun 3, Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan: Petani, NIK: 5320010101710001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) adalah Aliansi yang belum melaporkan/ mendaftarkan serta tidak terdaftar keberadaannya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 224/27/Kesbang-SR/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021 (Bukti T-1) dan bukan pula sebagai Lembaga Pemantau Pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Berikut hasil dari pemilihan umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

NO.	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA PASLON	PERSENTASI
1.	Nikodemus N Rihi Heke, M.Si & Yohanis Uly Kale	13.313 suara	30,10%
2.	Drs. Orient Riwu Kore, M.Si & Thobias Uly, M.Si	21.363 suara	48,30%
3.	Ir. Taken Radja Pono, M.Si & Herman Hegi Radja Haba M.Si	9.557 suara	21,60%
	Total suara sah	44.233	100%

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok dan inti permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Keputusan dan atau penetapan Termohon in casu Komisi pemilihan umum kabupaten Sabu raijua dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

untuk menjawab hal tersebut maka Pihak Terkait akan terlebih dahulu menjelaskan secara terperinci sebagai berikut :

PEMBAHASAN

Perkara ini merupakan perkara yang sangat menarik dan dapat dikatakan sangat jarang terjadi di Indonesia karena adanya warga negara asing yang terbukti mencalonkan diri sebagai Calon Bupati namun bukan warga negara Indonesia dan terpilih menjadi Bupati. Maka dari itu Mahkamah konstitusi sebagai pemegang tertinggi konstitusional di Indonesia harus mengambil keputusan dengan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua,

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.”²

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

KESIMPULAN

Berkaca dalam kasus Bupati terpilih Sabu Raijua yang merupakan warga negara Amerika Serikat dijelaskan bahwa Mahkamah konstitusi mempunyai hak untuk membatalkan kemenangannya setelah terbukti sebagai warga negara asing dan Mahkamah konstitusi berhak menolak permohonan dari sang pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

a. Laporan Penelitian

Ridwan arifin (program studi pascasarjana, fakultas hukum Universitas Gadjah mada, yogyakarta).

b. Sumber Internet

Anwar usman (ketua Mahkamah Konstitusi) 15/4/2021.

PDF Salinan putusan mahkamah konstitusi (google)

² Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.